



Katalog BPS: 1105011

Ringkasan eksekutif STATISTIK POTENSI DESA INDONESIA 2011



BADAN PUSAT STATISTIK

RINGKASAN EKSEKUTIF
STATISTIK POTENSI DESA
INDONESIA 2011

<http://www.bps.go.id>

2011

Ringkasan Eksekutif

Statistik Potensi Desa Indonesia 2011

ISBN : 978-979-064-369-7
No. Publikasi : 04310.1102
Katalog BPS : 1105011

Ukuran Buku : 15 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman : 49

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Kata Pengantar

Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011 yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali merupakan salah satu kegiatan BPS dalam upaya memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, khususnya dalam menggambarkan ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia. Pendataan Podes 2011 menghasilkan informasi awal mengenai gambaran umum desa, ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, komunikasi dan informasi, serta permukiman, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, lingkungan hidup serta bencana alam dan wabah penyakit.

Ringkasan eksekutif ini memuat informasi pokok sebagai hasil pendataan Podes 2011. Hasil kegiatan yang lebih rinci disajikan terpisah dalam dua jenis publikasi, yaitu Statistik Potensi Desa 2011 dan Statistik Infrastruktur 2011. Statistik Potensi Desa 2011 disajikan dalam dua cakupan, yaitu nasional dan provinsi. Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat membantu para pengguna data dalam memahami data dan informasi yang dihasilkan melalui pendataan Podes 2011.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik konstruktif dan saran perbaikan bagi publikasi serupa di masa mendatang akan sangat diharapkan.

Jakarta, November 2011

Deputi Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik

Wynandin Imawan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Gambaran Umum Desa di Indonesia	1
Fasilitas Pendidikan	5
Fasilitas Kesehatan	10
Fasilitas Ekonomi	13
Fasilitas Transportasi, Komunikasi, dan Informasi	17
Fasilitas Permukiman	20
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	26
Lingkungan Hidup	30
Bencana Alam dan Wabah Penyakit	37

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jumlah Desa menurut Letak Geografis.....	2
Tabel 2.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah dan Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.....	3
Tabel 3.	Jumlah Wilayah Administrasi di Indonesia.....	4
Tabel 4.	Jumlah Desa dan Fasilitas menurut Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 5.	Jumlah Desa menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Desa	8
Tabel 6.	Jumlah Desa dan Fasilitas menurut Jenis Fasilitas Kesehatan	10
Tabel 7.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa.....	12
Tabel 8.	Jumlah Desa menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, Akomodasi, dan Konsumsi.....	13
Tabel 9.	Jumlah Desa menurut Ketersediaan Koperasi dan Perbankan.....	14
Tabel 10.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Industri Kecil dan Mikro (IKM).....	15
Tabel 11.	Perkembangan Jumlah Desa menurut Ketersediaan Fasilitas Telekomunikasi.....	18
Tabel 12.	Jumlah Desa menurut Jenis Lalu Lintas Transportasi	19
Tabel 13.	Jumlah Desa menurut Ketersediaan Listrik.....	20
Tabel 14.	Jumlah Desa menurut Ketersediaan Lapangan Olahraga.....	23
Tabel 15.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Jenis Tempat Ibadah.....	24
Tabel 16.	Jumlah Desa menurut Tindak Kejahatan yang Terjadi.....	26
Tabel 17.	Jumlah Desa menurut Perkelahian Massal yang Terjadi.....	27
Tabel 18.	Jumlah Desa yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana.....	28
Tabel 19.	Jumlah Desa menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir	29
Tabel 20.	Jumlah Desa menurut Pencemaran Lingkungan yang Dialami Selama Setahun Terakhir	30
Tabel 21.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Lokasi/Kebiasaan yang Dapat Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan.....	31
Tabel 22.	Jumlah Desa menurut Keberadaan Tempat Buang Sampah	33
Tabel 23.	Jumlah Desa menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup.....	34

Tabel 24. Jumlah Desa menurut Keberadaan Pembakaran Ladang/Kebun dan Lokasi Penggalian Golongan C.....	35
Tabel 25. Jumlah Desa menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Permukiman Kumuh.....	36
Tabel 26. Jumlah Desa menurut Bencana Alam yang Terjadi.....	37
Tabel 27. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Upaya/Sarana Antisipasi Bencana.....	38
Tabel 28. Jumlah Desa menurut Jenis Wabah Penyakit yang Terjadi.....	39
Tabel 29. Jumlah Desa menurut Jenis Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir	40

<http://www.bps.go.id>

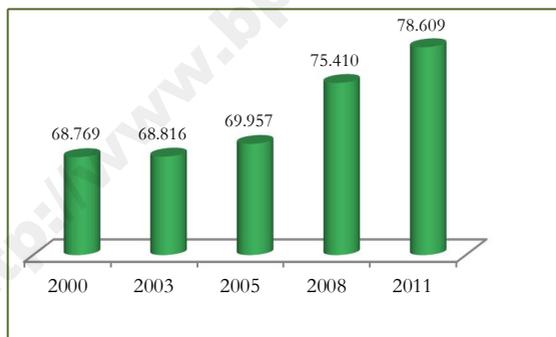
Daftar Gambar

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Desa, 2000-2011	1
Gambar 2. Jumlah Kecamatan menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Menengah.....	6
Gambar 3. Rata-Rata Jarak (dalam Km) dari Kantor Desa ke Fasilitas Pendidikan Terdekat menurut Jenjang Pendidikan	7
Gambar 4. Peta Tematik Ketersediaan Sekolah Dasar di Desa.....	9
Gambar 5. Perkembangan Jumlah Desa yang Memiliki Posyandu menurut Aktivitas Posyandu	11
Gambar 6. Perbandingan Jumlah Desa menurut Ketersediaan Kios Saprotan.....	16
Gambar 7. Jumlah Desa menurut Siaran Televisi yang Dapat Diterima	18
Gambar 8. Perkembangan Jumlah Desa menurut Keberadaan Penjual Bahan Bakar untuk Memasak.....	21
Gambar 9. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Tempat Ibadah.....	22
Gambar 10. Peta Tematik Ketersediaan Listrik di Desa.....	25
Gambar 11. Peta Tematik Kejadian Bencana Alam di Desa	41
Gambar 12. Peta Tematik Kejadian Wabah Penyakit di Desa.....	42

Gambaran Umum Desa di Indonesia

Pada bulan April 2011, jumlah desa di Indonesia mencapai 78.609 desa.

Jumlah desa di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 2011, jumlah wilayah administrasi terkecil di Indonesia adalah sebanyak 78.609 wilayah setingkat desa yang mencakup 70.390 desa, 8.083 kelurahan, dan 136 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT). Untuk selanjutnya wilayah administrasi terkecil setingkat desa, seperti kelurahan dan lainnya akan disebut desa. Pada Gambar 1, terlihat bahwa peningkatan yang cukup besar terjadi sejak tahun 2004. Hal ini terkait diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Desa, 2000-2011

Desa-desa tersebut tersebar di 6.771 kecamatan yang berada di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari jumlah desa tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 25.224 desa dan di Pulau Sumatera sebanyak 24.213 desa. Tiga provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah (8.577 desa), Jawa Timur (8.502 desa) dan Jawa Barat (5.905 desa). Tiga provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Provinsi Aceh (6.483 desa), Sumatera Utara (5.797 desa) dan Papua (3.924 desa).

Sekitar
11.884 desa
berada di
tepi laut dan
2.902 desa
berada di
dalam
kawasan
hutan.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara 2 (dua) benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia dan 2 (dua) samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Akibat letak geografis tersebut maka terdapat 11.884 desa atau sekitar 15,12 persen desa di Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut (tepi laut). Selain itu, dilihat berdasarkan topografi desa, ada sebanyak 17.355 desa atau sekitar 22,07 persen desa yang terletak di lereng atau puncak. Hal ini menyebabkan desa-desa tersebut rawan terhadap bencana alam seperti gunung meletus.

Indonesia juga terkenal dengan hutan hujan tropis yang masih luas. Hasil pendataan Podes 2011 mencatat bahwa 2.902 desa di Indonesia terletak di dalam kawasan hutan dan sekitar 15.816 desa terletak di tepi/sekitar kawasan hutan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya perambahan hutan yang mengancam keberadaan hutan hujan tropis di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Desa menurut Letak Geografis

Letak	Jumlah
(1)	(2)
Topografi Desa/Kelurahan	
- Puncak	1.092
- Lereng	16.263
- Lembah	3.745
- Hampan	57.509
Posisi Terhadap Laut	
- Tepi Laut	11.884
- Bukan Tepi Laut	66.725
Posisi Terhadap Kawasan Hutan	
- Di dalam	2.902
- Di tepi / sekitar	15.816
- Di luar	59.891

1.975 desa tidak memiliki BPD dan 4.712 kelurahan tidak memiliki dewan kelurahan.

Jika dilihat berdasarkan status pemerintahan maka sebagian besar wilayah administrasi terkecil di Indonesia masih mempunyai status pemerintahan sebagai desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun berdasarkan hasil Podes 2011 masih terdapat 7.849 desa yang tidak mempunyai kantor kepala desa dan 1.975 desa yang tidak mempunyai BPD (termasuk di dalamnya adalah Badan Musyawarah Nagari).

Tabel 2. Jumlah Desa menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah dan Keberadaan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan

Keberadaan	Jumlah		
	Desa	Kelurahan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Kantor Kepala Desa			
- Ada, di dalam wilayah desa/kelurahan	61.800	7.895	103
- Ada, di luar wilayah desa/kelurahan	741	121	3
- Tidak ada	7.849	67	30
Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan			
- Ada	68.415	3.371	79
- Tidak Ada	1.975	4.712	57

Tabel 3. Jumlah Wilayah Administrasi di Indonesia

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Wilayah Administrasi Terkecil			
			Desa	Kelurahan	Lainnya*	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	23	284	6.483	0	0	6.483
Sumatera Utara	33	421	5.141	653	3	5.797
Sumatera Barat	19	176	774	259	0	1.033
Riau	12	155	1.460	195	0	1.655
Jambi	11	131	1.216	156	0	1.372
Sumatera Selatan	15	222	2.811	375	0	3.186
Bengkulu	10	124	1.357	150	2	1.509
Lampung	14	214	2.285	175	4	2.464
Kep. Bangka Belitung	7	46	300	61	0	361
Kep. Riau	7	59	220	133	0	353
DKI Jakarta	6	44	0	267	0	267
Jawa Barat	26	625	5.266	639	0	5.905
Jawa Tengah	35	573	7.810	767	0	8.577
DI Yogyakarta	5	78	392	46	0	438
Jawa Timur	38	662	7.717	784	1	8.502
Banten	8	154	1.272	263	0	1.535
Bali	9	57	636	80	0	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	932	136	16	1.084
Nusa Tenggara Timur	21	290	2.651	315	0	2.966
Kalimantan Barat	14	175	1.876	91	0	1.967
Kalimantan Tengah	14	125	1.362	135	31	1.528
Kalimantan Selatan	13	151	1.857	142	1	2.000
Kalimantan Timur	14	140	1.253	210	2	1.465
Sulawesi Utara	15	159	1.364	325	4	1.693
Sulawesi Tengah	11	155	1.646	161	8	1.815
Sulawesi Selatan	24	304	2.201	769	12	2.982
Sulawesi Tenggara	12	204	1.754	354	13	2.121
Gorontalo	6	70	654	72	5	731
Sulawesi Barat	5	69	570	66	2	638
Maluku	11	86	989	33	2	1.024
Maluku Utara	9	113	959	112	8	1.079
Papua Barat	11	175	1.350	72	17	1.349
Papua	29	414	3.832	87	5	3.924
INDONESIA	497	6.771	70.390	8.083	136	78.609

* Unit Pemukiman Transmigrasi (UPI) / Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT)

Fasilitas Pendidikan

Masih terdapat 10.259 desa yang tidak mempunyai sekolah dasar.

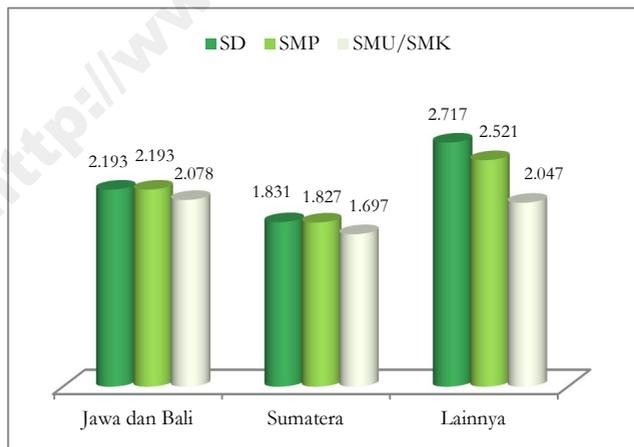
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah mencanangkan program wajib belajar (wajar) sejak tahun 1989 dan wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994. Program pemerintah tersebut perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP yang mudah diakses oleh penduduk usia sekolah. Untuk itu pendataan Podes 2011 juga mencakup informasi mengenai jumlah fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMU, SMK dan sebagainya.

Tabel 4. Jumlah Desa dan Fasilitas menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Desa	Jumlah Fasilitas
(1)	(2)	(3)
TK	47.592	98.796
SD sederajat	68.350	168.036
SMP sederajat	31.718	46.085
SMU/SMK sederajat	16.407	26.783

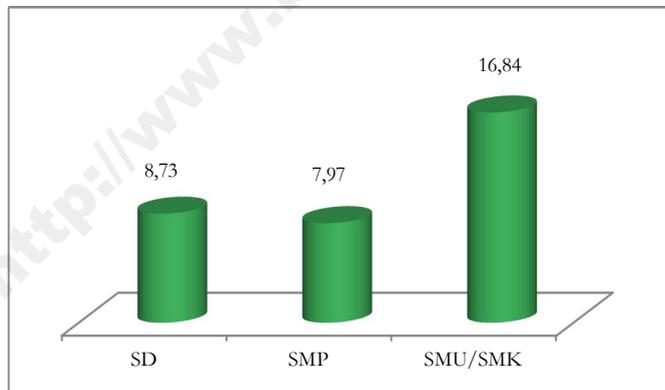
Hasilnya menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan anak usia dini seperti TK, sudah terdapat di lebih dari separuh desa di Indonesia (47.592 desa). Selain itu, sebagian besar desa di Indonesia sudah memiliki fasilitas pendidikan SD sederajat (68.350 desa atau 86,95%). Namun untuk fasilitas pendidikan SMP sederajat hanya terdapat di 31.718 desa atau 40,35 persen desa. Ini berarti masih ada sekitar 10.259 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SD sederajat dan 46.891 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMP sederajat.

Kesinambungan siswa sekolah dasar untuk dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu dijaga dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau. Pada Tabel 5 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit pula jumlah desa yang mempunyai fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Contohnya, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah desa yang ada fasilitas SD sederajat sebanyak 2.836 desa, sementara untuk fasilitas SMP sederajat hanya ada di 1.059 desa dan fasilitas SMU sederajat hanya ada di 289 desa. Hal ini disebabkan karena tidak semua lulusan SD atau SMP melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga ketersediaan fasilitas sekolah pada jenjang tersebut juga terbatas. Di tingkat kecamatan, pada Gambar 2 terlihat bahwa secara umum jumlah kecamatan yang memiliki SD atau SMP lebih banyak dari pada jumlah kecamatan yang memiliki fasilitas SMU/SMK. Namun perbedaan terbesar adalah pada jumlah kecamatan yang memiliki SMU/SMK.



Gambar 2. Jumlah Kecamatan menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Menengah

Rendahnya partisipasi sekolah penduduk dapat pula disebabkan karena minimnya fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau. Kemudahan akses murid untuk menjangkau fasilitas pendidikan yang tidak berada di desa dapat dilihat dari seberapa jauh jarak yang harus ditempuh untuk mencapai fasilitas pendidikan terdekat. Gambar di bawah menyajikan rata-rata jarak (dalam km) dari kantor desa ke fasilitas pendidikan terdekat menurut jenjang pendidikan. Rata-rata jarak yang harus ditempuh penduduk di desa yang tidak mempunyai fasilitas sekolah menurut jenjang pendidikan adalah 8,73 km untuk mencapai SD terdekat, 7,97 km untuk mencapai SMP terdekat dan 16,84 km untuk mencapai SMU/SMK terdekat.



Gambar 3. Rata-Rata Jarak (dalam km) dari Kantor Desa ke Fasilitas Pendidikan Terdekat menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 5. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Desa

Provinsi	TK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMU/ Sederajat	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.867	3.227	1.023	497	127
Sumatera Utara	1.813	4.725	1.912	923	504
Sumatera Barat	835	987	611	279	137
Riau	1.191	1.602	957	425	163
Jambi	798	1.326	651	262	99
Sumatera Selatan	1.232	2.875	1.143	532	150
Bengkulu	562	1.148	403	134	66
Lampung	1.635	2.350	1.242	517	232
Kep. Bangka Belitung	222	356	169	68	37
Kep. Riau	198	331	202	90	45
DKI Jakarta	256	264	251	222	185
Jawa Barat	4.781	5.891	3.632	1.618	1.078
Jawa Tengah	7.953	8.469	3.334	1.126	883
DI Yogyakarta	438	437	305	136	128
Jawa Timur	8.152	8.442	4.259	1.873	980
Banten	987	1.526	1.111	546	302
Bali	656	709	302	139	104
Nusa Tenggara Barat	856	1.073	773	422	164
Nusa Tenggara Timur	1.221	2.836	1.059	289	147
Kalimantan Barat	552	1.895	864	283	108
Kalimantan Tengah	958	1.493	602	190	78
Kalimantan Selatan	1.454	1.856	693	251	69
Kalimantan Timur	834	1.204	577	246	117
Sulawesi Utara	1.172	1.467	635	212	121
Sulawesi Tengah	1.235	1.718	751	235	103
Sulawesi Selatan	2.325	2.862	1.446	623	238
Sulawesi Tenggara	1.223	1.740	715	285	84
Gorontalo	530	629	322	80	40
Sulawesi Barat	404	612	294	97	58
Maluku	376	901	452	187	69
Maluku Utara	353	985	440	175	72
Papua Barat	212	774	180	82	35
Papua	311	1.640	408	142	79
INDONESIA	47.592	68.350	31.718	13.186	6.802

Fasilitas Kesehatan

58.049 desa telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes atau Polindes.

Fasilitas kesehatan yang dikumpulkan dalam pendataan Potensi Desa 2011 mencakup keberadaan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu), pos pelayanan terpadu (posyandu) dan lainnya. Jumlah desa menurut ketersediaan fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 6. Dari berbagai fasilitas kesehatan tersebut, tercatat 58.049 desa atau sekitar 73,84 persen desa telah memiliki fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas, pustu, poskesdes atau polindes. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa-desa di Indonesia telah memiliki kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di desa.

Tabel 6. Jumlah Desa dan Fasilitas menurut Jenis Fasilitas Kesehatan

Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Desa	Jumlah Fasilitas
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	1.783	2.012
Rumah Sakit Bersalin	3.523	5.245
Puskesmas	9.070	9.212
Puskesmas Pembantu	22.050	22.883
Poskesdes	27.618	27.041
Polindes	13.754	14.408

Poskesdes merupakan fasilitas kesehatan yang paling banyak dari segi jumlah desa yang dicakup maupun jumlah fasilitas. Poskesdes dan Polindes merupakan dua jenis fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam satu desa. Secara umum Poskesdes dan Polindes telah menjangkau sekitar 48,91 persen desa. Untuk Puskesmas, yang pelayanannya meliputi beberapa desa, jumlahnya baru sekitar 9.212 puskesmas. Namun dalam memberikan pelayanan puskesmas banyak dibantu oleh Puskesmas Pembantu yang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu 22.883 Pustu.

Salah satu sarana kesehatan yang dicatat dalam pendataan Podes 2011 adalah Posyandu. Hampir semua desa di Indonesia tercatat sudah memiliki posyandu (73.943 desa). Namun jika dilihat dari keberadaan posyandu aktif maka jumlah desa yang memiliki minimal satu posyandu aktif sekitar 73.695 desa. Angka ini naik sekitar 6,19 persen dari kondisi tahun 2008 (69.396 desa). (Posyandu dikategorikan sebagai posyandu aktif jika masih memberikan pelayanan selama 12 bulan terakhir). Namun jika dilihat lebih rinci pada Gambar 5 terlihat bahwa jumlah desa yang memiliki posyandu yang seluruhnya aktif mengalami penurunan sekitar 99,02 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat posyandu aktif pada tahun 2008 yang menjadi posyandu tidak aktif pada tahun 2011.



Gambar 5. Perkembangan Jumlah Desa yang Memiliki Posyandu menurut Aktifitas Posyandu

Ketersediaan sarana kesehatan yang ada di desa perlu didukung oleh jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Pendataan Podes 2011 tidak mengumpulkan informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit, rumah sakit bersalin dan sebagainya. Informasi tenaga kesehatan yang dicakup hanya mengenai keberadaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa. Namun informasi ini diharapkan sudah dapat menggambarkan mengenai ketersediaan tenaga kesehatan di desa.

Dukun bayi,
Bidan, dan
Mantri
Kesehatan
merupakan
tenaga
kesehatan yang
telah mencakup
lebih dari
separuh desa.

Dukun bayi dan bidan merupakan tenaga kesehatan yang telah mencakup lebih dari 54 ribu desa. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 maka jumlah desa yang memiliki dukun bayi mengalami penurunan sekitar satu persen, sementara jumlah desa yang memiliki bidan meningkat sekitar 8 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah desa yang memiliki Mantri Kesehatan, yang meningkat dari 33.074 desa menjadi 39.857 desa atau sekitar 20 persen. Jumlah desa yang memiliki dokter wanita juga meningkat lebih tinggi, yaitu sekitar 7 persen daripada peningkatan jumlah desa yang memiliki dokter pria yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen.

Tabel 7. Jumlah Desa menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa

Tenaga Kesehatan	2008	2011
(1)	(2)	(3)
Dokter pria	10.721	10.798
Dokter wanita	8.829	9.420
Dokter gigi	5.099	5.954
Bidan	52.975	57.416
Mantri kesehatan	33.074	39.857
Dukun bayi	54.609	54.115

Fasilitas Ekonomi

Jumlah desa yang memiliki pasar meningkat sebesar 8,65 persen.

Beberapa fasilitas perekonomian yang tercakup dalam pendataan Podes 2011 diantaranya adalah sarana perdagangan, sarana akomodasi dan konsumsi, sarana koperasi dan perbankan, serta keberadaan industri mikro dan kecil. Sarana perdagangan yang dicakup adalah pasar, kelompok pertokoan, minimarket, dan toko/warung kelontong. Keberadaan pasar sebagai salah satu sarana perdagangan dibedakan menjadi pasar dengan bangunan permanen maupun semi permanen dan pasar tanpa bangunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 maka jumlah desa yang memiliki pasar meningkat sebesar 8,65 persen. Sementara sarana perdagangan yang paling umum ada di desa adalah toko/warung kelontong yang sudah ada di 68.955 desa.

Tabel 8. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, Akomodasi dan Konsumsi

Jenis Sarana	2008	2011
(1)	(2)	(3)
Sarana Perdagangan		
Pasar		
- Pasar dengan bangunan	12.849	13.960
- Pasar tanpa bangunan	9.056	8.188
Kelompok Pertokoan	9.554	10.582
Minimarket	5.849	8.677
Toko/warung kelontong	63.522	68.955
Sarana Akomodasi dan Konsumsi		
- Hotel	2.765	3.091
- Penginapan	3.216	3.562
- Restoran/rumah makan	10.919	7.541

Sarana akomodasi dan konsumsi yang dicakup adalah hotel, hostel, motel, losmen dan wisma serta restoran dan rumah makan. Jumlah desa yang telah tersedia fasilitas hotel lebih sedikit jumlahnya daripada desa yang tersedia penginapan. Keberadaan hotel telah tersebar di 3.091 desa, sementara penginapan lainnya seperti hostel, motel, losmen dan wisma telah terdapat di 3.562 desa. Untuk sarana konsumsi, jumlah desa yang memiliki restoran/rumah makan menurun 30,94 persen dari tahun 2008 yaitu menjadi sebanyak 7.541 desa.

Tabel 9. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Koperasi dan Perbankan

Jenis Sarana	Jumlah
(1)	(2)
Koperasi	
- Koperasi Unit Desa (KUD)	6.772
- Kop. Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinra)	930
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	16.524
- Koperasi non KUD lainnya	10.678
Perbankan	
- Bank Umum	6.550
- Bank Perkreditan Rakyat	4.287

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) telah menjangkau 21,02 persen desa atau 16.524 desa.

Ketersediaan koperasi dan perbankan di desa merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian desa. Koperasi yang tercakup dalam pendataan Podes 2011 dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinra), Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dan koperasi non KUD lainnya. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2011, koperasi simpan pinjam telah tersebar di sekitar 21,02 persen desa atau 16.524 desa, sementara KUD hanya tersebar di 6.772 desa.

Keberadaan perbankan yang tercakup dalam pendataan Podes 2011 dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Keberadaan bank umum lebih banyak menjangkau desa-desa daripada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum telah dapat ditemui pada 6.550 desa, sementara Bank Perkreditan rakyat hanya dapat ditemui pada 4.287 desa.

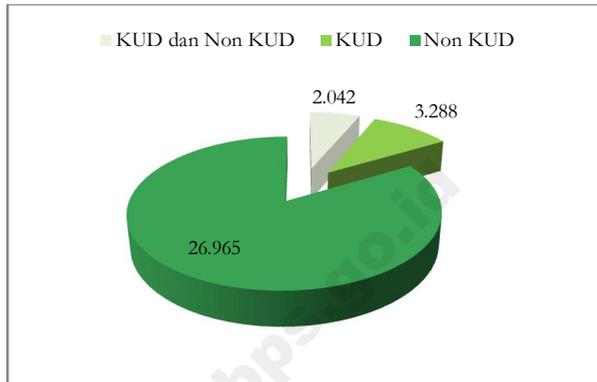
Tabel 10. Jumlah Desa menurut Keberadaan Industri Kecil dan Mikro (IKM)

Jenis IKM	Jumlah
(1)	(2)
Industri dari kulit	2.592
Industri dari kayu	33.176
Industri logam/logam mulia	5.678
Industri anyaman	19.925
Industri gerabah	13.253
Industri dari kain/tenun	10.785
Industri makanan dan minuman	32.722
Industri lainnya	12.618

Keberadaan industri kecil dan mikro telah menjangkau 54.145 desa.

Keberadaan industri merupakan salah satu fasilitas perekonomian, dimana Industri kecil dan mikro telah menjangkau 54.145 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis IKM tersebut dapat dibedakan menurut bahan dasar utama yang digunakan, yaitu kulit, kayu, logam/logam mulia, anyaman, gerabah, kain/tenun, makanan dan minuman dan lainnya. Jenis industri yang telah ada di hampir separuh desa di Indonesia adalah industri dari kayu (33.176 desa) dan industri makanan dan minuman (32.722 desa). Jenis industri yang hanya ada di desa-desa tertentu saja adalah industri dari kulit (2.592 desa), industri dari logam/logam mulia (5.678 desa), industri gerabah (13.253 desa) dan industri kain/tenun (10.785 desa).

Fasilitas perekonomian lainnya yang terkait bidang pertanian adalah keberadaan kios sarana produksi pertanian (saprotan). Kios saprotan telah tersebar di 28.211 desa, dimana kios saprotan yang dikelola oleh KUD terdapat di 3.288 desa dan kios saprotan yang dikelola non KUD terdapat di 26.965 desa.



Gambar 6. Perbandingan Jumlah Desa menurut Ketersediaan Kios Saprotan

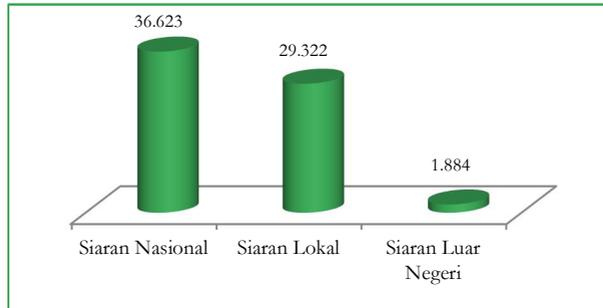
Fasilitas Transportasi, Komunikasi, dan Informasi

Masih terdapat 2.147 yang hanya mempunyai akses jalan antar desa melalui transportasi air. Desa-desa tersebut sebagian besar terdapat di Provinsi Papua.

Potensi kemajuan desa tergantung pada akses desa tersebut terhadap kemajuan di wilayah lain. Kemajuan di wilayah lain dapat dengan mudah berpengaruh jika ditunjang oleh 3 (tiga) aspek, yaitu akses transportasi, informasi dan komunikasi terhadap wilayah lain. Kemudahan akses transportasi dari/ke desa dapat dilihat dari jenis lalu lintas transportasi yang dapat digunakan dan ketersediaan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun. Secara umum, hampir semua desa atau sekitar 97,27 persen desa (76.462 desa) dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat, sementara jumlah desa yang hanya dapat diakses melalui jalan air hanya sekitar 2.147 desa (2,73 %). Desa-desa yang hanya mengandalkan transportasi air paling banyak terdapat di wilayah timur, seperti Maluku dan Papua. Jumlah desa per provinsi menurut jenis lalu lintas transportasi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 12. Selain itu, hampir semua desa yang dapat diakses melalui jalan darat atau sebanyak 67.660 desa telah memiliki jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun.

Salah satu cara untuk menentukan akses desa terhadap informasi dapat dilihat berdasarkan program/siaran televisi yang dapat diterima di desa tersebut. Podes 2011 mencakup jenis siaran televisi yang dapat diterima oleh warga desa tanpa menggunakan antena parabola ataupun TV kabel. Jenis siaran televisi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu siaran televisi lokal, siaran televisi nasional, dan siaran televisi swasta. Secara umum 42.914 desa sudah dapat mengakses minimal satu siaran televisi dan lebih dari separuh jumlah desa yang dapat menerima program/siaran TV nasional tanpa menggunakan antena parabola ataupun TV kabel (42.680 desa).

Sebanyak 42.914 desa sudah dapat mengakses informasi melalui siaran TV (minimal satu siaran).



Gambar 7. Jumlah Desa menurut Siaran Televisi yang dapat Diterima

Kemudahan akses komunikasi di desa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas komunikasi umum seperti telepon umum, wartel, warnet dan kantor pos. Secara umum, jumlah desa yang mempunyai fasilitas telekomunikasi umum mengalami penurunan 1,51 persen dari tahun 2008 yang mencapai 29.078 desa. Namun jika dilihat menurut jenis fasilitas komunikasi umum maka jumlah desa yang memiliki wartel mengalami penurunan lebih dari setengah, sebaliknya jumlah desa yang memiliki warnet meningkat hampir 4 kali lipat. Ini dapat diakibatkan karena semakin populernya penggunaan telepon genggam yang dapat mengindikasikan kemajuan perkembangan telekomunikasi saat ini dan semakin meningkatnya kebutuhan internet di masyarakat. Sementara fasilitas telekomunikasi lainnya mengalami peningkatan yang wajar.

Tabel 11. Perkembangan Jumlah Desa menurut Ketersediaan Fasilitas Telekomunikasi

Fasilitas Telekomunikasi	2008	2011
(1)	(2)	(3)
Telepon Umum	3.114	4.690
Wartel	23.094	8.503
Kantor Pos/Pos Pembantu	3.893	3.931
Pos Keliling	9.414	9.984
Warnet	4.296	16.755

Tabel 12. Jumlah Desa menurut Jenis Lalu Lintas Transportasi

Provinsi	Jenis Lalu Lintas		
	Darat	Air	Darat dan Air
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6.354	27	102
Sumatera Utara	5.581	45	171
Sumatera Barat	984	12	37
Riau	1.284	60	311
Jambi	1.211	9	152
Sumatera Selatan	2.697	51	438
Bengkulu	1.505	1	3
Lampung	2.376	2	86
Kep. Bangka Belitung	325	4	32
Kep. Riau	194	60	99
DKI Jakarta	263	4	-
Jawa Barat	5.862	5	38
Jawa Tengah	8.564	2	11
DI Yogyakarta	438	-	-
Jawa Timur	8.450	7	45
Banten	1.525	3	7
Bali	714	-	2
Nusa Tenggara Barat	1.063	1	20
Nusa Tenggara Timur	2.889	13	64
Kalimantan Barat	1.203	131	633
Kalimantan Tengah	569	279	680
Kalimantan Selatan	1.592	36	372
Kalimantan Timur	861	142	462
Sulawesi Utara	1.514	37	142
Sulawesi Tengah	1.640	44	131
Sulawesi Selatan	2.829	42	111
Sulawesi Tenggara	1.853	40	228
Gorontalo	703	2	26
Sulawesi Barat	607	3	28
Maluku	514	151	359
Maluku Utara	555	186	338
Papua Barat	933	308	198
Papua	3.048	440	436
INDONESIA	70.700	2.147	5.762

Fasilitas Permukiman

Masih terdapat 3.132 desa yang belum dapat menikmati listrik dan 45.775 desa yang belum ada penerangan di jalan utama desa.

Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di desa yang lengkap dan memadai merupakan salah satu potensi suatu desa dijadikan sebagai lokasi tempat tinggal atau permukiman. Beberapa fasilitas permukiman yang tercakup dalam pendataan Podes 2011 diantaranya adalah ketersediaan listrik PLN, penerangan jalan utama, keberadaan agen penjual minyak tanah/elpiji, fasilitas olahraga dan tempat ibadah. Jumlah desa yang warganya sudah dapat menikmati listrik sekitar 96,02 persen atau 75.477 desa, namun jika dilihat berdasarkan sumber listriknya maka listrik PLN baru menjangkau sebanyak 63.933 desa. Hal ini berarti masih ada sebanyak 3.132 desa yang belum tersedia listrik. Desa-desa berdasarkan ketersediaan listrik dapat dilihat pada Gambar 10.

Tabel 13. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Listrik

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Ketersediaan Listrik di Desa	
- Ada	75.477
- Tidak Ada	3.132
Penerangan Jalan Utama	
- Listrik Pemerintah	32.588
- Listrik Non Pemerintah	13.185
- Non Listrik	2
- Tidak Ada	32.834

Penerangan jalan utama yang dicakup dalam Podes 2011 merupakan informasi mengenai sumber penerangan yang digunakan pada jalan utama desa. Sekitar 45.773 desa (58,23 %) telah mempunyai penerangan jalan utama, namun baru sebanyak 32.588 desa yang sumber penerangan jalan utama dari listrik pemerintah. Ini berarti masih ada sekitar 32.834 desa (41,77%) yang jalan utama desa tidak mempunyai penerangan.



Gambar 8. Perkembangan Jumlah Desa menurut Keberadaan Penjual Bahan Bakar untuk Memasak

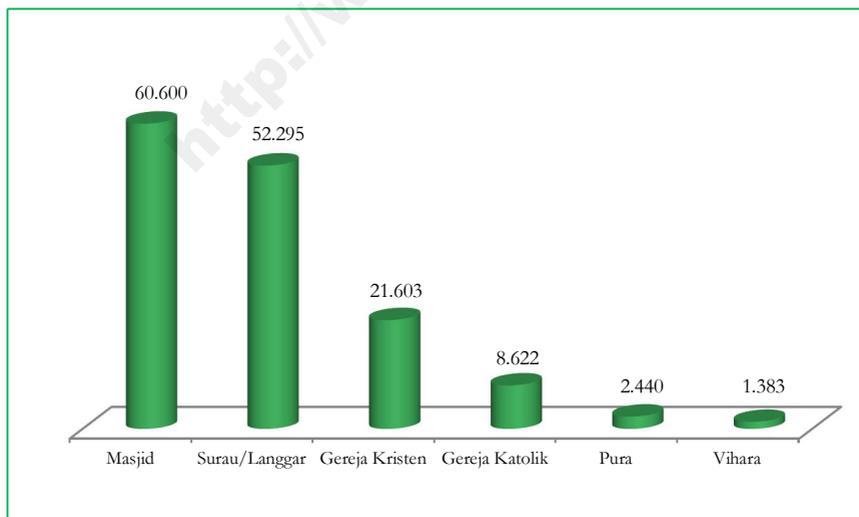
Jumlah desa yang tersedia penjual/agen elpiji mengalami peningkatan sebesar 92,21 persen dari 20.482 desa pada tahun 2008 menjadi 39.368 desa pada tahun 2011.

Selain penerangan jalan utama dan ketersediaan listrik PLN, informasi penting lainnya yang disediakan oleh Podes 2011 adalah mengenai keberadaan agen/penjual bahan bakar. Secara umum, jumlah desa yang telah tersedia penjual bahan bakar untuk memasak baik minyak tanah maupun elpiji meningkat sebesar 42,96 persen dari 32.190 desa pada tahun 2008 menjadi 42.022 desa pada tahun 2011. Namun jika dilihat berdasarkan jenis bahan bakar maka terlihat bahwa jumlah desa yang tersedia penjual/agen minyak tanah mengalami penurunan sebesar 35,39 persen dari 25.774 desa pada tahun 2008 menjadi 16.653 desa pada tahun 2011. Sementara jumlah desa yang tersedia penjual/agen elpiji mengalami peningkatan sebesar 92,21 persen dari 20.482 desa pada tahun 2008 menjadi 39.368 desa pada tahun 2011. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi keberhasilan program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada wilayah Indonesia bagian timur seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi Utara, persentase desa yang mempunyai Gereja menjadi sangat dominan dibanding tempat ibadah lainnya.

Ketersediaan fasilitas umum atau fasilitas sosial seperti keberadaan tempat ibadah dan fasilitas olahraga di desa juga dapat menjadi nilai tambah bagi desa tersebut sebagai tempat permukiman. Masjid merupakan tempat ibadah yang telah ada di 60.600 desa atau sekitar 77,09 persen desa, sementara Surau atau Langgar telah ada di sekitar 66,53 persen desa. Untuk penduduk yang beragama kristen keberadaan gereja terdapat di 21.603 desa atau sekitar 27,48 persen desa sementara gereja katolik hanya terdapat di 8.622 desa.

Ketersediaan jenis tempat ibadah sangat dipengaruhi oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh penduduk desa. Pada wilayah Indonesia bagian timur seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi Utara, persentase desa yang mempunyai Gereja menjadi sangat dominan dibanding tempat ibadah lainnya. Di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, jumlah desa yang mempunyai masjid juga lebih dominan dibandingkan tempat ibadah agama lain. hanya tercatat sedikit desa yang memiliki masjid. Jumlah desa menurut keberadaan jenis tempat ibadah per provinsi dapat dilihat pada Tabel 15.



Gambar 9. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Tempat Ibadah

Jenis olahraga yang telah banyak memiliki lapangan olahraga dengan ukuran sesuai standar adalah Bola Voli, Sepak Bola dan Bulu Tangkis.

Keberadaan fasilitas olahraga yang dicatat dalam Podes 2011 mengikuti jenis olahraga yang populer di Indonesia, seperti Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis dan sebagainya. Namun Podes 2011 hanya mencakup lapangan olahraga yang ukurannya sesuai dengan standar internasional. Jenis olahraga yang telah banyak memiliki lapangan olahraga dengan ukuran sesuai standar adalah Bola Voli, Sepak Bola dan Bulu Tangkis. Walaupun Sepak Bola dan Bulu Tangkis merupakan dua cabang olahraga yang paling populer di Indonesia namun jumlah desa yang mempunyai lapangan olahraga sesuai standar masih kalah jauh dibandingkan dengan Bola Voli. Lapangan Sepakbola hanya ada di sekitar 50,50 persen desa atau 39.698 desa, lapangan Bulu Tangkis terdapat di sekitar 43,74 persen desa atau 34.387 desa, sementara lapangan Bola Voli sudah terdapat di 68,15 persen desa atau 53.571 desa.

Tabel 14. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Lapangan Olahraga

Jenis Lapangan	Jumlah
(1)	(2)
Sepak Bola	39.698
Bola Voli	53.571
Bulu Tangkis	34.387
Bola Basket	4.931
Tenis	3.575
Futsal	3.619
Kolam Renang	3.809

Tabel 15. Jumlah Desa menurut Keberadaan Jenis Tempat Ibadah

Provinsi	Masjid	Surau/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Kapela	Pura	Vihara	Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	3.403	5.791	85	14	-	-	10	2
Sumatera Utara	3.787	2.810	3.449	1.686	13	36	159	113
Sumatera Barat	995	981	50	51	2	1	3	1
Riau	1.628	1.583	393	144	3	6	61	65
Jambi	1.334	1.194	110	34	10	4	8	18
Sumatera Selatan	3.149	2.195	311	159	33	121	51	29
Bengkulu	1.487	696	108	43	3	22	9	1
Lampung	2.453	2.283	599	337	38	281	107	5
Kep. Bangka Belitung	352	306	70	43	4	7	47	90
Kep. Riau	338	286	105	50	5	4	58	61
DKI Jakarta	267	267	201	102	5	22	67	22
Jawa Barat	5.897	5.862	327	147	8	27	92	35
Jawa Tengah	8.560	8.407	1.550	505	72	136	286	61
DI Yogyakarta	438	422	158	82	75	16	13	-
Jawa Timur	8.466	8.384	1.197	366	17	263	100	49
Banten	1.535	1.529	99	32	-	9	55	14
Bali	123	113	84	35	3	706	30	13
Nusa Tenggara Barat	1.077	971	20	11	1	153	16	2
Nusa Tenggara Timur	533	147	1.248	644	1.437	25	-	1
Kalimantan Barat	1.228	1.041	1.105	1.092	299	22	93	189
Kalimantan Tengah	962	789	911	321	7	35	9	10
Kalimantan Selatan	1.596	1.873	124	45	2	36	16	3
Kalimantan Timur	934	762	760	412	8	28	25	7
Sulawesi Utara	650	163	1.373	271	11	16	9	9
Sulawesi Tengah	1.495	589	842	168	1	175	10	4
Sulawesi Selatan	2.735	1.215	710	351	6	43	21	4
Sulawesi Tenggara	2.043	454	179	69	-	138	12	-
Gorontalo	716	191	85	13	-	11	2	2
Sulawesi Barat	498	220	287	88	-	46	2	-
Maluku	533	170	561	165	14	15	3	5
Maluku Utara	780	316	455	57	1	1	-	2
Papua Barat	287	113	946	189	11	11	3	1
Papua	321	172	3.101	896	64	24	6	-
INDONESIA	60.600	52.295	21.603	8.622	2.153	2.440	1.383	818

Gambar 10. Peta Tematik Ketersediaan Listrik Di Desa



Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tindak kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian yang terjadi di 28.912 desa dengan yang terbanyak terjadi di provinsi Jawa Barat.

Podas 2011 mencatat kejadian kejahatan, yaitu pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan/penggelapan, penganiayaan, pembakaran, perkosaan/tindak asusila, penyalahgunaan/peredaran narkoba, perjudian, pembunuhan dan perdagangan orang. Semua tindak kejahatan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator keamanan suatu daerah.

Secara umum, jumlah desa yang mengalami tindak kejahatan mengalami penurunan sekitar 7,56 persen dari 37.086 desa pada tahun 2008 menjadi 34.282 desa pada tahun 2011. Namun pencurian masih merupakan tindak kejahatan yang paling banyak dialami oleh desa-desa di Indonesia yang telah mencakup 28.912 desa, diikuti oleh perjudian di 7.984 desa dan penipuan/penggelapan yang terjadi di 5.603 desa. Jika dilihat menurut provinsi maka pencurian paling banyak terjadi di Jawa Barat yaitu terjadi di sebanyak 4.157 desa.

Tabel 16. Jumlah Desa menurut Tindak Kejahatan yang Terjadi

Tindak Kejahatan	Jumlah
(1)	(2)
Pencurian	28.912
Pencurian dengan kekerasan	2.330
Penipuan/ penggelapan	5.603
Penganiayaan	4.171
Pembakaran	518
Perkosaan/ tindak asusila	2.122
Penyalahgunaan/ peredaran narkoba	4.103
Perjudian	7.984
Pembunuhan	1.585
Perdagangan orang	119

Selain tindak kejahatan di atas, indikator keamanan dan ketertiban juga dapat dilihat dari maraknya kejadian perkelahian massal. Podes 2011 mencatat perkelahian massal yang dibedakan menjadi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/ kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, aparat pemerintah, antar pelajar/ mahasiswa, antar suku dan lainnya.

Tabel 17. Jumlah Desa menurut Perkelahian Massal yang Terjadi

Tindak Kejahatan	Jumlah
(1)	(2)
Antar kelompok warga	1.348
Warga antar desa/ kelurahan	1.054
Warga dengan aparat keamanan	120
Warga dengan aparat pemerintah	102
Antar pelajar/ mahasiswa	210
Antar suku	102
Lainnya	149

Persentase desa yang mengalami kejadian perkelahian massal sekitar 3,26 persen, namun jumlah desa yang mengalami tindak kejahatan tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 12,22 persen dari 2.283 desa pada tahun 2008 menjadi 2.562 desa pada tahun 2011. Perkelahian antar kelompok dan perkelahian antar desa/kelurahan merupakan perkelahian massal yang paling banyak dialami oleh desa, yaitu mencakup 1.348 desa, sementara perkelahian warga antar desa/kelurahan mencakup 1.054 desa. Provinsi yang desanya paling banyak mengalami perkelahian antar kelompok warga adalah di Provinsi Papua yaitu sebanyak 224 desa. Sementara itu, perkelahian warga antar desa/ kelurahan paling banyak terdapat di 99 desa di Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya desa yang mengalami perkelahian massal menunjukkan kurang/ tidak adanya kerukunan di daerah tersebut.

Tabel 18. Jumlah Desa Yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Pidana

Provinsi	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/ Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaan	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	1.101	63	147	97	16	57	465	242	30	1
Sumatera Utara	1.713	93	227	267	53	131	543	1.423	118	7
Sumatera Barat	420	55	84	79	24	60	172	239	29	-
Riau	726	79	123	58	17	44	170	236	57	6
Lambi	534	57	72	49	9	27	67	122	26	-
Sumatera Selatan	1.473	221	150	169	22	66	220	325	98	1
Benekulu	599	33	74	59	12	47	39	52	24	1
Lampung	1.402	186	216	116	9	63	124	229	59	2
Kep. Bangka Belitung	174	16	77	54	8	25	40	57	19	2
Kep. Riau	115	13	25	16	4	15	24	21	14	4
DKI Jakarta	199	35	30	22	6	4	74	34	17	-
Jawa Barat	4.157	287	925	452	26	208	507	498	124	33
Jawa Tengah	3.628	146	817	321	20	187	246	644	103	12
DI Yogyakarta	275	28	112	57	-	22	59	70	7	1
Jawa Timur	3.767	290	766	439	27	257	545	1.227	138	16
Banten	978	54	228	100	5	30	126	169	31	1
Bali	200	13	37	47	2	12	19	154	11	-
Nusa Tenggara Barat	641	107	134	131	12	39	50	135	32	2
Nusa Tenggara Timur	612	54	86	239	56	113	13	176	93	7
Kalimantan Barat	517	33	84	56	14	48	60	210	39	3
Kalimantan Tengah	374	41	41	59	3	29	38	114	27	-
Kalimantan Selatan	820	85	126	95	13	25	191	209	57	1
Kalimantan Timur	348	25	58	52	8	40	88	112	32	3
Sulawesi Utara	554	27	92	201	11	73	9	171	47	8
Sulawesi Tengah	407	24	95	100	15	47	54	240	34	-
Sulawesi Selatan	1.110	54	219	261	20	42	84	260	87	1
Sulawesi Tenggara	361	23	43	118	2	26	8	109	31	-
Gorontalo	114	4	31	73	3	29	11	60	16	-
Sulawesi Barat	150	7	27	22	2	9	8	36	13	-
Maluku	148	9	41	64	7	37	16	105	25	1
Maluku Utara	176	2	22	26	5	38	12	70	11	-
Papua Barat	113	13	26	41	5	19	2	32	18	-
Papua	1.006	153	368	231	82	253	19	203	118	6
INDONESIA	28.912	2.330	5.603	4.171	518	2.122	4.103	7.984	1.585	119

Tabel 19. Jumlah Desa menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir

Provinsi	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/ Kelurahan	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34	29	4	2	4	1	3
Sumatera Utara	69	39	10	3	4	2	1
Sumatera Barat	21	24	0	1	9	0	2
Riau	23	15	5	4	1	3	3
Jambi	14	29	3	1	6	2	2
Sumatera Selatan	25	25	5	7	5	2	3
Bengkulu	9	11	4	1	4	1	1
Lampung	12	19	5	1	2	1	1
Kep. Bangka Belitung	11	14	2	0	1	0	1
Kep. Riau	2	3	1	2	0	0	1
DKI Jakarta	27	16	2	1	23	0	5
Jawa Barat	10	56	5	6	44	3	2
Jawa Tengah	97	99	2	3	4	1	8
DI Yogyakarta	4	0	0	0	8	1	0
Jawa Timur	88	66	4	4	8	0	1
Banten	42	21	2	0	12	1	1
Bali	9	3	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4	2	3	4
Nusa Tenggara	79	93	7	3	10	6	1
Kalimantan Barat	13	6	3	1	1	3	6
Kalimantan Tengah	18	4	0	0	0	0	3
Kalimantan Selatan	1	8	0	1	0	1	2
Kalimantan Timur	22	11	1	4	2	3	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2	2	0	0
Sulawesi Tengah	22	40	6	1	3	2	2
Sulawesi Selatan	53	58	4	3	16	3	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2	1	1	2
Gorontalo	7	5	4	3	2	1	6
Sulawesi Barat	6	0	1	1	1	0	3
Maluku	94	55	5	10	11	2	0
Maluku Utara	52	64	5	7	4	1	4
Papua Barat	56	27	3	5	2	1	2
Papua	224	93	21	19	18	57	9
INDONESIA	1.348	1.054	120	102	210	102	149

Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup selama setahun terakhir telah dirasakan oleh 13.440 desa di Indonesia.

Keberadaan lingkungan hidup secara fisik, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain, sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Karenanya segala kegiatan ataupun perilaku yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup harus dicegah. Pencemaran lingkungan hidup dapat disebabkan oleh peristiwa alam ataupun kegiatan manusia.

Pencemaran lingkungan hidup selama setahun terakhir telah dirasakan oleh 13.440 desa di Indonesia. Pencemaran lingkungan yang paling banyak tercatat adalah pencemaran air yang terjadi di 8.162 desa dan pencemaran udara yang terjadi di 7.007 desa. Jenis pencemaran yang paling sedikit dialami oleh desa, adalah pencemaran tanah yang hanya terjadi di 1.306 desa. Jika dilihat menurut provinsi pencemaran air paling banyak terjadi di Jawa Barat (1.017 desa), pencemaran tanah paling banyak terjadi di Jawa Tengah (183 desa) dan pencemaran udara paling banyak terjadi di Jawa Tengah (1.894 desa). Jenis pencemaran lingkungan hidup yang paling banyak dialami oleh desa-desa per provinsi dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 20. Jumlah Desa menurut Pencemaran Lingkungan yang Dialami Selama Setahun Terakhir

Jenis Pencemaran	Ada Pengaduan	Tidak Ada Pengaduan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
- Pencemaran Air	4.243	3.919	8.162
- Pencemaran Tanah	649	657	1.306
- Pencemaran Udara	2.973	4.034	7.007

Potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia dapat dilihat dari adanya berbagai kegiatan ataupun penggunaan barang yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Contohnya kebiasaan membakar ladang/kebun, penggalian golongan C, keberadaan permukiman di bawah Sutet, dan keberadaan permukiman kumuh, serta keberadaan permukiman di bantaran sungai.

Tabel 21. Jumlah Desa menurut Keberadaan Lokasi/ Kebiasaan yang dapat Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Pembakaran Ladang/Kebun	18.620
Lokasi Penggalian Golongan C	20.065
Permukiman di bawah Sutet	3.641
Permukiman Kumuh	4.267
Permukiman di bantaran sungai	20.170

Kebiasaan pembakaran ladang/kebun dapat menyebabkan pencemaran udara yang berakibat pada gangguan kesehatan dan pada wilayah-wilayah tertentu dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Namun, pembakaran ladang/kebun telah menjadi kebiasaan pada sekitar 23,69 persen desa (18.620 desa). Pembakaran ladang/kebun yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup hanya terjadi di 1.364 desa. Kebiasaan ini terutama terjadi di sebagian besar desa-desa di daerah Sumatera. Kebiasaan ini sangat beresiko untuk terjadinya kebakaran hutan karena masih luasnya kawasan hutan di daerah Sumatera yang kemudian diikuti oleh daerah Kalimantan dan Sulawesi.

Aktivitas warga desa untuk mendapatkan penghasilan dari melakukan kegiatan penggalian golongan C selain dapat membahayakan lingkungan juga dapat mengancam kehidupan warga yang ada di sekitar lokasi penggalian. Lokasi penggalian golongan C telah berada di 20.065 desa atau sekitar 25,52 persen desa. Jumlah desa yang terdapat lokasi penggalian golongan C banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mencapai lebih dari 2.000 desa. Banyaknya desa menurut keberadaan pembakaran ladang/kebun dan lokasi penggalian golongan C per provinsi dapat dilihat pada Tabel 24.

Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) juga dapat menimbulkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh paparan medan elektromagnetik yang tidak terlihat secara kasat mata. Sutet dibangun untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pengguna listrik sehingga energi dapat disalurkan dengan efisien. Namun keberadaan sutet di wilayah yang padat penduduk dapat mengancam kesehatan penduduk itu sendiri. Berdasarkan hasil Podes 2011 tercatat sekitar 4.946 desa dilalui sutet dan 3.641 desa diantaranya terdapat permukiman penduduk di bawah sutet. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah wilayah dimana jumlah desa yang ada permukiman di bawah Sutet lebih dari 700 desa.

Potensi pencemaran lingkungan hidup lainnya yang juga tidak kalah kompleks adalah timbulnya permukiman kumuh sebagai akibat dari semakin tingginya kepadatan penduduk di kota-kota besar yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas lingkungan hunian. Podes 2011 mencatat terdapat 4.267 desa yang di dalamnya ada permukiman kumuh. Provinsi yang paling banyak terdapat pemukiman kumuh adalah Jawa Barat 982 desa dan diikuti 376 desa di Sumatera Utara.

Selain permukiman kumuh, keberadaan permukiman di bantaran sungai juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian ketersediaan sumber daya air khususnya air baku yang menjadi sumber air minum. Jumlah desa yang tercatat terdapat permukiman di bantaran sungai adalah sebanyak 20.170 desa. Wilayah yang banyak terdapat permukiman di bantaran sungai lebih dari 1000 desa adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Informasi lengkap mengenai keberadaan permukiman di bawah tutet, permukiman kumuh dan permukiman di bantaran sungai dapat di lihat pada Tabel 25.

Tabel 22. Jumlah Desa Menurut Keberadaan Tempat Buang Sampah

Tempat Buang Sampah	Jumlah
(1)	(2)
Tempat Sampah	7.994
Dalam lubang/dibakar	49.392
Sungai/ Saluran Irigasi	5.659
Drainase (got/selokan)	578
Lainnya	14.986

Masih ada sebagian besar keluarga di 578 desa membuang sampah ke got atau selokan.

Kebiasaan lainnya yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan adalah perilaku masyarakat sehari-hari dalam membuang sampah rumah tangga. Perilaku membuang sampah dibedakan berdasarkan tempat dan cara yang digunakan, yaitu dibuang di tempat sampah yang kemudian diangkut ke TPA, dikumpulkan didalam lubang dan atau dibakar, dibuang langsung ke sungai atau saluran irigasi, drainase dan lainnya. Umumnya sebagian besar keluarga di desa lebih banyak membuang sampah didalam lubang atau dibakar, yang terdapat pada 49.392 desa. Membuang sampah pada tempat sampah hanya menjadi perilaku sebagian besar keluarga yang berada pada 7.994 desa. Dan masih ada sekitar 578 desa yang sebagian besar keluarganya membuang sampah ke drainase seperti got dan selokan.

Tabel 23. Jumlah Desa menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Provinsi	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	498	79	220
Sumatera Utara	489	63	401
Sumatera Barat	137	17	87
Riau	207	24	195
Jambi	188	6	77
Sumatera Selatan	396	35	151
Bengkulu	127	24	91
Lampung	207	21	289
Kep. Bangka Belitung	166	66	20
Kep. Riau	28	4	20
DKI Jakarta	49	5	21
Jawa Barat	1.017	140	744
Jawa Tengah	797	183	1.894
DI Yogyakarta	44	9	127
Jawa Timur	594	101	1.205
Banten	248	50	302
Bali	85	8	35
Nusa Tenggara Barat	146	15	49
Nusa Tenggara Timur	70	21	62
Kalimantan Barat	558	98	166
Kalimantan Tengah	500	42	71
Kalimantan Selatan	426	83	180
Kalimantan Timur	259	55	91
Sulawesi Utara	181	22	76
Sulawesi Tengah	114	18	55
Sulawesi Selatan	176	29	176
Sulawesi Tenggara	60	8	61
Gorontalo	64	4	26
Sulawesi Barat	39	5	30
Maluku	47	12	15
Maluku Utara	97	22	31
Papua Barat	45	4	9
Papua	103	33	30
INDONESIA	8.162	1.306	7.007

Tabel 24. Jumlah Desa menurut Keberadaan Pembakaran Ladang/Kebun dan Lokasi Penggalian Golongan C

Provinsi	Pembakaran Ladang/Kebun			Lokasi Penggalian Golongan C	
	Ada, Menyebabkan Pencemaran Lingkungan	Ada, Tidak Menyebabkan Pencemaran Lingkungan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	63	716	5.704	712	5.771
Sumatera Utara	85	875	4.837	1.175	4.622
Sumatera Barat	31	258	744	424	609
Riau	61	363	1.231	321	1.334
Jambi	21	392	959	376	996
Sumatera Selatan	68	1.150	1.968	660	2.526
Bengkulu	20	621	868	274	1.235
Lampung	29	263	2.172	805	1.659
Kep. Bangka Belitung	7	203	151	182	179
Kep. Riau	11	122	220	128	225
DKI Jakarta	-	-	267	3	264
Jawa Barat	52	515	5.338	1.268	4.637
Jawa Tengah	37	398	8.142	2.108	6.469
DI Yogyakarta	-	3	435	227	211
Jawa Timur	33	514	7.955	2.260	6.242
Banten	12	192	1.331	324	1.211
Bali	1	25	690	121	595
Nusa Tenggara Barat	11	212	861	522	562
Nusa Tenggara Timur	80	1.204	1.682	1.299	1.667
Kalimantan Barat	306	1.066	595	456	1.511
Kalimantan Tengah	82	797	649	443	1.085
Kalimantan Selatan	26	350	1.624	369	1.631
Kalimantan Timur	94	772	599	413	1.052
Sulawesi Utara	22	333	1.338	426	1.267
Sulawesi Tengah	16	588	1.211	805	1.010
Sulawesi Selatan	50	639	2.293	817	2.165
Sulawesi Tenggara	4	714	1.403	889	1.232
Gorontalo	5	158	568	353	378
Sulawesi Barat	13	120	505	227	411
Maluku	23	579	422	543	481
Maluku Utara	17	585	477	362	717
Papua Barat	6	867	566	329	1.110
Papua	78	1.662	2.184	444	3.480
INDONESIA	1.364	17.256	59.989	20.065	58.544

Tabel 25. Jumlah Desa menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Permukiman Kumuh

Provinsi	Permukiman di				Permukiman Kumuh	
	Bantaran/Tepi Sungai		Bawah Sute			
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	896	2.724	54	48	67	6.416
Sumatera Utara	948	3.571	102	70	376	5.421
Sumatera Barat	479	360	61	18	76	957
Riau	604	669	20	1	48	1.607
Jambi	786	410	49	31	44	1.328
Sumatera Selatan	1.189	1.450	78	32	236	2.950
Bengkulu	366	913	1	-	8	1.501
Lampung	615	1.335	111	90	150	2.314
Kep. Bangka Belitung	47	244	-	-	19	342
Kep. Riau	80	54	6	4	61	292
DKI Jakarta	99	81	67	10	185	82
Jawa Barat	1.661	3.387	767	194	982	4.923
Jawa Tengah	1.910	5.546	767	234	317	8.260
DI Yogyakarta	122	221	32	7	11	427
Jawa Timur	1.162	5.319	851	322	235	8.267
Banten	507	675	245	47	288	1.247
Bali	201	419	42	20	22	694
Nusa Tenggara Barat	526	434	-	3	224	860
Nusa Tenggara Timur	402	1.203	-	-	20	2.946
Kalimantan Barat	906	938	17	4	168	1.799
Kalimantan Tengah	969	410	-	-	27	1.501
Kalimantan Selatan	1.213	481	40	17	28	1.972
Kalimantan Timur	645	617	12	6	132	1.333
Sulawesi Utara	603	586	43	36	93	1.600
Sulawesi Tengah	450	888	-	-	-	1.815
Sulawesi Selatan	1.117	1.190	238	82	314	2.668
Sulawesi Tenggara	396	890	2	2	16	2.105
Gorontalo	126	449	4	3	10	721
Sulawesi Barat	304	237	32	24	6	632
Maluku	146	373	-	-	26	998
Maluku Utara	100	521	-	-	-	1.079
Papua Barat	251	720	-	-	38	1.401
Papua	344	2.523	-	-	40	3.884
INDONESIA	20.170	39.833	3.641	1.305	4.267	74.342

Bencana Alam dan Wabah Penyakit

Banjir dan tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi. Tercatat 14.732 dan 7.521 desa yang terkena bencana alam tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Bencana alam dan wabah penyakit merupakan peristiwa yang dapat membawa kerugian jiwa dan materil yang sangat besar sehingga berdampak luas pada kehidupan masyarakat di wilayah kejadian. Informasi kejadian bencana alam yang tercatat dalam pendataan Podes 2011 adalah bencana alam yang telah menyebabkan kerugian, minimal kerugian materil, yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jenis bencana alam yang dicatat antara lain; tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan, kekeringan (lahan).

Jumlah desa yang mengalami bencana alam selama 3 (tiga) tahun terakhir meningkat sekitar 4 persen dari 29.945 desa pada tahun 2008 menjadi 29.368 desa pada tahun 2011. Namun berdasarkan jenis bencana alam yang dialami terjadi tren menurun pada setiap jenis bencana alam, kecuali untuk kejadian gunung meletus yang meningkat lebih dari 5 kali lipat.

Tabel 26. Jumlah Desa menurut Bencana Alam yang Terjadi

Bencana Alam	2008	2011
(1)	(2)	(3)
Tanah longsor	7.558	7.521
Banjir	15.143	14.732
Banjir Bandang	2.201	1.631
Gempa Bumi	4.931	4.381
Tsunami	54	21
Gelombang pasang laut	1.699	1.609
Angin puyuh/ puting beliung/ topan	6.982	6.821
Gunung meletus	171	922
Kebakaran hutan	1.083	554
Kekeringan (lahan)	na	2.105

Untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam sebanyak 32.971 desa melakukan gotong royong dan 7.738 desa mengadakan penyuluhan keselamatan bencana alam.

Bencana alam yang paling banyak dialami oleh desa-desa di Indonesia selama tiga tahun terakhir adalah banjir yang terjadi di 14.732 desa kemudian diikuti oleh tanah longsor yang terjadi di 7.521 desa. Kejadian bencana banjir hampir merata dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia. Sebaran kejadian bencana alam yang paling sering menimpa desa dapat dilihat pada Gambar 11.

Bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia membutuhkan upaya maupun sarana untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam yang terjadi. Beberapa upaya/sarana yang tercakup dalam Podes 2011 adalah sistem peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, upaya gotong royong warga, penyuluhan keselamatan dan lainnya. Hampir separuh desa di Indonesia (32.971 desa) melakukan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam. Upaya lain yang dilakukan di 7.738 desa adalah dengan mengadakan penyuluhan keselamatan bencana alam. Khusus untuk 30.781 desa yang merupakan wilayah berpotensi tsunami sebanyak 2,44 persen atau 752 desa telah mengantisipasi dengan sistem peringatan dini tsunami.

Tabel 27. Jumlah Desa menurut Ketersediaan Upaya/Sarana Antisipasi Bencana

Upaya/sarana Antisipasi Bencana	Jumlah
(1)	(2)
Sistem peringatan dini tsunami	752
Perlengkapan keselamatan	1.551
Gotong royong warga	32.971
Penyuluhan keselamatan	7.738
Upaya/sarana lainnya	2.107

Pendataan Podes 2011 mencatat beberapa jenis penyakit yang sering mewabah dan menyebabkan kerugian materil maupun jiwa seperti muntaber/diare, demam berdarah, campak, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), malaria, flu burung, Tuberculose (TB). Wabah penyakit yang paling banyak terjadi adalah muntaber/diare dan demam berdarah. Provinsi yang desanya paling banyak terjadi wabah muntaber/diare adalah Jawa Timur yaitu terjadi di 893 desa. Sementara itu, flu burung merupakan wabah penyakit yang paling sedikit dialami oleh desa-desa di Indonesia, yaitu hanya terjadi di 203 desa. Wabah penyakit yang paling banyak menimpa desa-desa di masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 12.

Tabel 28. Jumlah Desa Menurut Jenis Wabah Penyakit yang Terjadi

Jenis Penyakit	Jumlah
(1)	(2)
Muntaber / Diare	9.409
Demam Berdarah	7.723
Campak	3.504
Ispa	5.778
Malaria	8.033
Flu Burung	203
TB	4.890
Lainnya	7.545

Tabel 29. Jumlah Desa menurut Jenis Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir

Provinsi	Muntaber / Diare	Demam Berdarah	Campak	ISPA	Malaria	Flu Burung	TB	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	770	733	484	526	878	1	263	392
Sumatera Utara	522	609	427	300	583	15	327	481
Sumatera Barat	273	202	305	175	166	14	146	184
Riau	202	112	134	177	127	4	92	143
Jambi	86	24	80	56	94	7	42	165
Sumatera Selatan	405	170	191	194	343	6	160	588
Bengkulu	201	61	96	138	322	14	124	420
Lampung	165	157	97	89	204	8	106	460
Kep. Bangka Belitung	11	5	7	13	26	2	4	48
Kep. Riau	46	33	28	27	74	1	24	15
DKI Jakarta	42	73	21	32	1	3	21	6
Jawa Barat	778	1.024	281	448	101	38	659	441
Jawa Tengah	608	1.139	111	354	134	14	399	1.022
DI Yogyakarta	12	72	6	11	3	3	14	75
Jawa Timur	893	1.396	140	559	109	12	524	730
Banten	277	267	117	163	50	4	237	85
Bali	32	99	7	42	1	1	34	64
Nusa Tenggara Barat	133	107	40	93	141	-	74	277
Nusa Tenggara Timur	405	111	67	382	630	-	219	47
Kalimantan Barat	329	125	118	208	364	3	209	338
Kalimantan Tengah	236	44	55	134	225	3	109	130
Kalimantan Selatan	152	77	14	54	78	-	-	247
Kalimantan Timur	234	143	89	227	232	3	176	101
Sulawesi Utara	232	162	65	145	393	4	126	380
Sulawesi Tengah	259	79	60	172	346	-	120	131
Sulawesi Selatan	565	330	146	256	177	9	239	115
Sulawesi Tenggara	170	61	46	59	101	1	74	62
Gorontalo	80	22	22	21	36	2	28	104
Sulawesi Barat	64	19	7	38	44	-	14	52
Maluku	198	18	35	114	292	2	69	32
Maluku Utara	358	63	130	226	539	2	92	88
Papua Barat	155	20	12	114	321	2	38	51
Papua	516	166	66	231	898	25	127	71
INDONESIA	9.409	7.723	3.504	5.778	8.033	203	4.890	7.545

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Jakarta 10010
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

978 - 979 - 064 - 369-7



978 979 064 369 7